

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini teknologi informasi menjadi suatu bagian yang sangat penting bagi perusahaan, lembaga-lembaga dan instansi pemerintahan. Salah satunya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Padang Pariaman, merupakan sebuah satuan kerja perangkat daerah untuk tersenggarakannya manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien di daerah kabupaten padang pariaman.

Sistem yang dipakai oleh BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman yaitu sistem informasi manajemen kepegawaian, dimana sistem ini dipakai oleh semua sub bidang di BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman. Khusus pada pengolahan data merupakan admin utama dari sistem informasi manajemen kepegawaian, yang dipegang oleh bidang pengolahan data, informasi, dan status kepegawaian.

Dimana pada bidang pengolahan data, informasi, dan status kepegawaian memakai sistem bawaan atau sistem penunjang dari pusat yaitu sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK). Bidang pengolahan data, informasi, dan status kepegawaian berkontribusi terhadap data-data kepegawaian, yang bertugas untuk mengelola data-data arsip pegawai tersebut.

Tujuan dari pengolahan data, informasi, dan status kepegawaian adalah untuk mengelola arsip-arsip pegawai yang dimana arsip tersebut akan diletakkan di dalam sebuah lemari takah yaitu tempat penyimpanan arsip kepegawaian, tempat untuk pengurusan kartu pegawai seperti kartu suami (Karsu), dan kartu istri (Karis), serta mengolah data yang akan diminta oleh pemimpin.

Hasil perstasi kinerja individu pegawai sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi, yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pembinaan pegawai antara lain untuk pengangkatan, kenaikan pangkat, pendidikan dan pelatihan serta memberi penghargaan. Pada saat ini belum ada audit sistem informasi di sub bidang pengolahan data, informasi, dan status kepegawaian.terutama mengenai tingkat pengukuran kinerja, pemeliharaan, perawatan, serta resiko yang dihadapi dalam penggunaan pada sistem yang dipakai.

Sehingga institusi belum mengetahui secara pasti adanya permasalahan di dalam pelayanan pengolahan data, informasi, dan status kepegawaian. Oleh karena itu, diperlukan penganalisaan kinerja dalam pengolahan data sehingga kinerja para pegawai atau pengguna (*user*) dapat memberikan pelayanan informasi lebih cepat dan lebih baik, untuk itu BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman perlu mengukur kualitas sistem informasinya.

Hal ini menyebabkan BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman harus benar-benar mengantisipasi semua kelemahan sistem informasi yang

mereka miliki tersebut. Banyak cara yang dapat di tempuh untuk mengukur kualitas sistem informasi, antara lain menggunakan kerangka kerja (*Framework*) salah satunya adalah COBIT (*Control Objective For Information and Related Technology*) sebagai bahan acuan dalam melakukan audit sistem informasi pengolahan data, informasi, dan status kepegawaian.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penganalisaan guna mengimplementasikan ilmu yang dipelajari untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui penganalisaan sistem informasi dengan judul **“AUDIT SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA, INFORMASI, DAN STATUS KEPEGAWAIAN PADA SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN BKPSDM KABUPATEN PADANG PARIAMAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pengamatan pada BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi dalam mengaudit sistem informasi pengolahan data, informasi, dan status kepegawaian tersebut dengan menggunakan framework COBIT, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu:

1. Bagaimana BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman untuk dapat melakukan pengolahan data-data pegawai?

2. Bagaimana melaksanakan audit sistem informasi pengolahan data, informasi, dan status kepegawaian di BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan framework COBIT?
3. Bagaimana hasil laporan dari audit sistem informasi pengolahan data, informasi, dan status kepegawaian pada BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan framework COBIT?

1.3 Hipotesa

Hipotesa adalah jawaban sementara dari rumusan masalah, berdasarkan perumusan masalah di atas maka dapat hipotesa sebagai berikut :

1. Dengan menggunakan sistem bawaan atau penunjang dari pusat yaitu sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) yang dipegang oleh sub pengolahan data informasi dan kepegawaian khusus dalam pengolahan data.
2. Dengan menerapkan kerangka kerja (*Framework*) COBIT diharapkan akan mempermudah auditor atau pengguna (*user*) dalam memberikan pelayanan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan proses pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara serta pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan, sehingga menghasilkan responden yang dapat digunakan untuk mengaudit sistem informasi pengolahan data, informasi, dan status kepegawaian.

3. Dengan menggunakan hasil laporan dari penyusunan berupa dokumen temuan dari hasil audit sistem informasi pengolahan data, informasi, dan status kepegawaian. Ouput yang dihasilkan berisi tentang hasil penganalisaan terhadap sistem yang dipakai, untuk dapat meberikan layanan informasi yang lebih efektif dan efisien, dan rekomendasi untuk manajemen pengolahan data pada BKPSDM kabupaten Padang Pariaman dimasa mendatang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan umum pada penelitian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Padang Pariaman ini adalah menganalisa audit sistem informasi pada proses tata kelola TI, kerangka kerja manajemen TI dan pengelolaan strategi TI, sumber daya manusia, anggaran dan biaya TI, dan layanan TI di Badan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan tujuan khususnya adalah sebagai berikut:
 - a. Mengidentifikasi kebutuhan dengan memahami tujuan dan lingkup proses organisasi.
 - b. Menganalisa dari tingkat kematangan audit sistem informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Padang Pariaman saat ini.

- c. Memberikan rekomendasi hasil menganalisa audit sistem informasi pada proses tata kelola TI, kerangka kerja manajemen dan pengelolaan strategi TI, investasi TI, dan layanan TI.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Manfaat tersebut diantaranya:
 - a. Memberikan gambaran pada organisasi mengenai audit sistem informasi yang baik (*good governance*).
 - b. Membantu organisasi dalam mengelola pada proses tata kelola TI, kerangka kerja manajemen dan pengelolaan strategi TI, investasi TI, dan layanan TI.
 - c. Menjadi referensi bagi penelitian berikutnya dalam mengaudit sistem informasi.

1.5 Batasan Masalah

Agar tidak terjadi suatu kesalahan dalam melakukan penelitian dan agar lebih terfokus, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dibahas. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan penelitiannya pada penganalisaan audit sistem informasi pengolahan data, informasi, dan status kepegawaian pada sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman. Dengan menggunakan pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada standar *framework* COBIT pada Domain DS (*Delivery and Support*).

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2018). Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional artinya bahwa penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk di akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris artinya bahwa cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) yang bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasinya (Sugiyono, 2018).

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data. Data yang digunakan (Sugiyono, 2018), yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan, yaitu:
 - a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data mempunyai ciri-ciri yang spesifik.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.

c. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa kajian pustaka yang berhubungan dengan topik dan permasalahan pada penelitian, yaitu:

a. Studi Literatur

Studi literatur adalah proses kegiatan menelaah dan membaca bahan pustaka seperti buku-buku, dokumen, mempelajari penelitian sejenis yang pernah dilakukan orang lain, serta mempelajari mengenai topik terkait penelitian yang dilakukan.

1.6.2 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yang menekankan pada sumber data dan fakta. Kemudian data

dikembangkan dengan acuan yang menggunakan *framework* COBIT, karena menyediakan petunjuk yang lebih detail yang dibutuhkan oleh pengguna sebagai referensi serta mudah dipahami dalam operasional TI.

1.6.3 Metode Penerapan Tata Kelola Sistem Informasi

Dalam penerapan audit sistem informasi terdapat beberapa tahapan berdasarkan acuan pada kerangka kerja (*framework*) COBIT yaitu:

1. Tahap 1 - *Initiate Programme*

Pada tahap ini menjelaskan tentang penggerak pada organisasi. Identifikasi penggerak perubahan saat ini dan kebutuhan perubahan pada tingkat manajemen eksekutif. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman tentang organisasi saat ini.

2. Tahap 2 - *Define Problems And Opportunities*

Pada tahap ini menjelaskan tentang kemampuan organisasi saat ini, kekurangan yang dimiliki dan semua yang berhubungan dengan TI dan strategi organisasi.

3. Tahap 3 - *Define Road Map*

Pada tahap ini menetapkan target untuk perbaikan yang diikuti dengan analisa *gap* untuk mengidentifikasi potensi solusi.

4. Tahap 4 - *Plan Programme*

Pada tahap ini menjelaskan tentang rencana dan solusi praktis untuk organisasi dengan mendefinisikan rekomendasi perbaikan yang mendukung tujuan organisasi dan perubahan rencana pengembangan.

1.7 Tinjauan Perusahaan

1.7.1 Sejarah Organisasi

Masyarakat Padang Pariaman, masih menurut narasi tambo, turun dari darek minangkabau, dari pedalaman tengah sumatera. penduduk daerah ini menurut laporan tahunan pemerintah daerah, berdasarkan pengakuan dari masyarakat padang pariaman sendiri, berasal dari paguruyung Batusangkar, yang terletak di darek minangkabau (Pemda Tk I Sumbar, 1978;7). Rantau Pariaman, selanjutnya menurut Dobbin, didirikan oleh imigran yang berasal dari Batipuh yang dianggap memiliki landasan kerajaan (Dobbin, 2008:84). Dalam waktu yang tidak pernah diketahui secara pasti, berkemungkinan sejak tahun 1300 M, para perantau awal(peneruka) tersebut turun bergelombang ke wilayah pantai barat dan membuka pemukiman.

Setelah kemerdekaan, Daerah administrasi periode kolonial, priaman, tikoe en de danau districten kemudian disahkan menjadi Kabupaten dengan nama Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibukota Kota Pariaman. Pada awalnya Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Peraturan Komisaris Pemerintah di Sumatera No 81/Kom/U/1948 tentang Pembagian Kabupaten di Sumatera Tengah yang terdiri dari 11 Kabupaten diantaranya disebut dengan nama Kabupaten Samudera dengan ibukotanya Pariaman, meliputi daerah kewedanaan Air Bangis, Pariaman, Lubuk

Alung, Padang Luar-Kota, Mentawai dan Nagari-Nagari Tiku, Sasak dan Katiagan.

Kabupaten Samudera ini terdiri dari 17 wilayah (gabungan nagari-nagari). Kabupaten Padang Pariaman dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tanggal 19 Maret 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, dimana Propinsi Sumatera tengah dibentuk menjadi 14 Kabupaten, yang salah satunya adalah Kabupaten Padang/Pariaman dengan batas-batas sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 dari Surat Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No. 10/G.M/S.T.G./49, dikurangi dengan daerah Kampung-Kampung Ulak Karang, Gunung Pangilun, Marapalam, Teluk Bajur, Seberang Padang dan Air Manis dari kewedanaan Padang Kota yang telah dimasukkan kedalam daerah Kota Padang, sebagai dimaksud dalam Surat ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah Tanggal 15 Agustus 1950 No. 65/G.P./50 Bupati Padang Pariaman semasa Agresi Militer Belanda Tahun 1948 adalah Mr. BA. Murad.

Semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) DPRD No 05/KEP.D/DPRD.2008 dan SK Bupati Padang Pariaman Nomor 02/KEP/BPP/2008 tertanggal 2 Juli 2008, Ibukota Kabupaten Padang Pariaman dipindahkan dari Kota Pariaman ke Paritmalintang, yakni Nagari Paritmalintang Kecamatan Enam Lingsung.

1.7.2 Visi dan Misi Organisasi

Peran strategis sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah untuk menjamin terselenggaranya manajemen kepegawaian yang efisien dan efektif di daerah, maka BKPSDM Kabupaten Padang perlu untuk menetapkan visi dan misi agar mampu mengarahkan perjalanan organisasinya melalui penyelenggaraan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

1. Visi

Visi ini memiliki 2 (dua) kunci pokok yakni :

- a. **Profesionalisme Aparatur**, maksudnya adalah suatu kondisi yang diharapkan dimana ASN diharapkan mampu mengemban tugas-tugas yang diberikan kepadanya, baik itu tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan tugas-tugas kemasyarakatan, sehingga dimanapun ia berada akan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.
- b. **Prima dalam Pelayanan**, maksudnya adalah Pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan/pengguna jasa. Prima dalam pelayanan dapat diukur jika terdapat standar operasional pelayanan yang sistematis dan terukur dengan jelas dan tegas.

2. Misi

- a. Pengembangan dan optimalisasi manajemen kepegawaian daerah
- b. Pengembangan dan pengoptimalan sistem pelayanan kepegawaian daerah

c. Pengembangan dan optimalisasi manajemen internal BKD

1.7.3 Struktur Organisasi

Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan pada suatu instansi pemerintahan dengan kata lain penyusunan struktur organisasi adalah langkah terencana dalam suatu instansi pemerintah untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

Menurut Stoner (1996:300) struktur organisasi yaitu menggabungkan semua orang yang terlibat dalam suatu kegiatan atau beberapa kegiatan terkait menjadi satu bagian, berikut adalah beberapa fungsi struktur organisasi yaitu :

1. Kejelasan Tanggung Jawab. Di dalam suatu perusahaan atau organisasi, setiap anggota harus bertanggung jawab atas apa yang harus dipertanggung jawabkan. Setiap anggota harus bertanggung jawab atas apa saja yang dikerjakan.
2. Kejelasan Kedudukan. Dengan adanya struktur organisasi akan membuat kejelasan kedudukan seseorang dapat mempermudah untuk melakukan koordinasi atau hubungan karena adanya keterkaitan penyelesaian suatu fungsi dipercaya kepada seseorang.
3. Kejelasan Jalur Hubungan. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap karyawan atau pegawai dalam suatu organisasi, maka dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur,

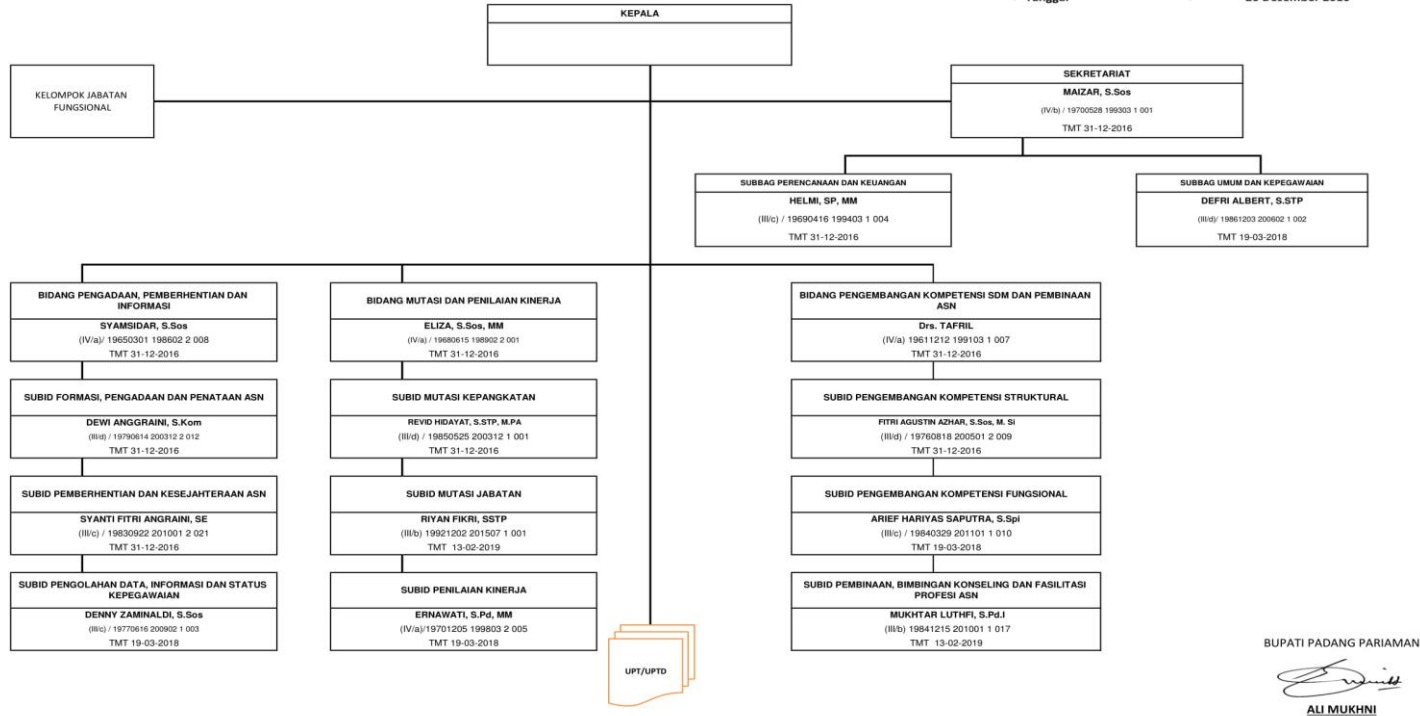
sehingga jalur penyelesaian pekerjaan akan semakin efektif dan dapat saling membantu karena terdapat uraian tugas yang jelas.

Bila kita lihat dari struktur organisasi BKPSDM Kabupate Padang Pariaman dapat dilihat fungsinya pada kejelasan kedudukan. Bentuk struktur organisasinya dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah :

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

24

Lampiran I : Peraturan Bupati Padang Pariaman
: Nomor : 69 Tahun 2016
: Tanggal : 20 Desember 2016



Sumber : Struktur Organisasi BKPSDM Kab. Padang Pariaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BKPSDM Kab. Padang Pariaman

1.7.3.1 Tugas dan Wewenang

Berdasarkan struktur organisasi di atas, dapat dijelaskan tugas masing-masing bagian :

1. Kepala

- a. Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepala bupati melalui sekda.
- b. Membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- c. Sebagai penyusun kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- d. Sebagai pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- e. Sebagai pelaksanaan pengelola UPT.
- f. Sebagai pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a. Melaksanakan urusan umum seperti administrasi, tata usaha, membuat laporan kepala, maupun melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh kepala.
- b. Melaksanakan penyusunan perencanaan serta rancangan program kepala.
- c. Mengelola adminstrasi keuangan dan kepegawaian.

3. Subbag Perencanaan dan Keuangan
 - a. Sebagai pelaksana dalam menyiapkan bahan pedoman serta petunjuk teknis di bidang perencanaan dan keuangan.
 - b. Sebagai pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang perencanaan dan keuangan.
 - c. Pengkoordinasi pelaksanaan tugas pemegang kas.
 - d. Sebagai pelaksanaan dalam memonitoring evaluasi serta pelaksanaan tugas sub bagaian.
 - e. Sebagai pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan berdasarkan bidang tugasnya.
4. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - a. Sebagai penyusun rencana kerja anggaran maupun rencana kerja sub bagian.
 - b. Menyiapkan petunjuk teknis serta pedoman terhadap pengelolaan administrasi.
 - c. Menyiapkan bahan konsultasi serta koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi
 - d. Sebagai pengumpul, pengolah, serta penganalisa data kebutuhan perlengkapan.
 - e. Sebagai pelaksana terkait pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, serta pemeliharaan perlengkapan / inventaris kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.